

**ANALISIS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN MELALUI ADVOKASI
TERHADAP KUNJUNGAN IBU BALITA KE POSYANDU DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS NANGGALO KOTA PADANG TAHUN 2017**

Hilda Hidayat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Biturrahmah

Email: Hildahidayat15@gmail.com

ABSTRACT

Pelaksanaan advokasi yang merupakan salah satu strategi promosi kesehatan dilakukan oleh petugas pemegang program promosi kesehatan kepada pimpinan puskesmas dan pemangku kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Berdasarkan laporan tahunan Puskesmas Nanggalo Tahun 2016, Puskesmas Nanggalo memiliki tingkat kunjungan ibu balita terendah (43,2%) dari target 80% di Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari sampai Juni 2017 di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang dengan metode penelitian kualitatif (6 orang informan). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. engolahan data dengan triangulasi. Di Puskesmas Nanggalo belum ada petunjuk teknis pelaksanaan posyandu, sumber dana dari APBD dan BOK. Petugas promkes telah melakukan advokasi untuk mendukung kegiatan posyandu kepada Pimpinan Puskesmas, Camat, Lurah, tetapi para pemangku kebijakan tersebut belum maksimal mendukung penyelenggaraan posyandu. Petugas promosi kesehatan langsung sebagai pelaksana kegiatan posyandu. Banyak ibu balita yang tidak berkunjung ke posyandu ketika hari pelaksanaan posyandu karena kader kurang aktif menghimbau ibu balita dan tidak memantau tumbuh kembang balita langsung ke rumah. Kegiatan posyandu tidak tetap dilaksanakan di rumah warga. Peralatan posyandu belum sesuai standar kesehatan. Diharapkan Pimpinan Puskesmas mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kegiatan posyandu seperti aturan tata cara penyelenggaraan posyandu sesuai standar kesehatan. Diharapkan pimpinan puskesmas bekerja sama dengan petugas promosi kesehatan mengadakan kegiatan pelatihan dan penyegaran kader. Pimpinan Puskesmas memberikan penghargaan bagi kader yang aktif bekerja dan sanksi apabila kader tidak aktif bekerja. Diharapkan Camat dan Lurah mendukung kegiatan posyandu dengan mengeluarkan kebijakan dalam memotivasi ibu balita ke posyandu.

Kata Kunci : Advokasi, Posyandu, Kunjungan Ibu Balita ke Posyandu

PENDAHULUAN

Kekurangan gizi pada bayi/balita merupakan penyumbang Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Dalam mengatasi masalah kekurangan gizi tersebut pemerintah mengupayakan penurunan AKI dan AKB dengan mencanangkan program yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (Depkes RI, 2008).

Salah satu kegiatan di posyandu adalah melakukan pemantauan gizi bayi dan balita melalui program D/S yang dilihat dari tingkat kunjungan ibu balita ke posyandu (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi (2016), bahwa dalam rencana aksi kegiatan pembinaan gizi masyarakat 2010-2015 telah ditetapkan target indikator 85% balita ditimbang berat badannya. Sasaran operasional kegiatan pembinaan gizi masyarakat tahun 2014 mencakup 2 indikator utamanya yaitu 70% balita ditimbang berat badannya dan 100% balita gizi buruk mendapat perawatan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2016), Jumlah provinsi yang cakupan D/S sudah mencapai target nasional ada 12 (36,4%). Provinsi dengan cakupan D/S rendah adalah provinsi Kalimantan Timur (39,9%), Papua (44,1%), Papua Barat

(44,9%) Kalimantan Tengah (46,0%), Sulawesi Tengah (49,3%), dan provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Gorontalo (85,7%) sedangkan Sumatera Barat cakupan D/S (77,5%).

Kemampuan melakukan advokasi (melobi) para pemangku kebijakan untuk mendukung kegiatan dan program yang akan kita jalankan dalam bentuk mengeluarkan aturan dan sanksi yang tegas tentang penyelenggaraan posyandu sehingga dapat meningkatkan kunjungan ibu balita ke posyandu. Namun, proses perubahan perilaku ibu balita tidaklah mudah, hal ini terlihat di Puskesmas Nanggalo yang mempunyai tingkat kunjungan ibu balita terendah (43,2%) dari target 80% di Kota Padang (Laporan DKK Padang, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dan dilaksanakan Januari sampai Juni 2017. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam terhadap 6 orang informan, telaah dokumen dan observasi. Validitas data dengan metode triangulasi. Di Puskesmas Nanggalo didapatkan belum ada petunjuk teknis, sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Di Puskesmas Nanggalo, petugas promkes sebagai pelaksana posyandu. Tempat penyelenggaraan posyandu menumpang di rumah warga dan mesjid. Peralatan seperti timbangan belum dikalibrasi. Pesan-pesan kesehatan seperti poster, leaflet, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tidak ada di Puskesmas Nanggalo. Petugas promosi kesehatan Puskesmas Nanggalo sudah melakukan upaya advokasi kepada Pimpinan Puskesmas, Camat, dan Lurah, namun belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan kegiatan posyandu sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan ibu balita ke posyandu.

Strategi promkes diarahkan untuk meningkatkan kunjungan ibu balita ke posyandu melalui advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Salah satu strategi promosi kesehatan yang sangat mempengaruhi suksesnya penyelenggaraan posyandu ini yaitu adanya upaya / proses yang bijak untuk memperoleh dukungan dengan menggunakan informasi yang tepat dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan salah satu strategi promkes tentang advokasi dan petunjuk teknis, Sumber Daya Manusia (SDM), dana, metode, tempat dan peralatan posyandu terhadap tingkat kunjungan ibu balita ke posyandu di Puskesmas Nanggalo Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi kebijakan untuk menggali informasi mendalam tentang pelaksanaan advokasi oleh petugas promosi kesehatan kepada pimpinan-pimpinan / pengambil keputusan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu. Informan penelitian adalah Petugas promosi kesehatan Puskesmas Nanggalo, Kepala Puskesmas Nanggalo, Camat Kecamatan Nanggalo, Lurah Kurao Pagang, Kader di Kelurahan Kurao Pagang, Ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. Alat yang digunakan pedoman wawancara mendalam, daftar telaah dokumen, catatan lapangan serta tape recorder. Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

HASIL PENELITIAN

Hasil pengumpulan data di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo berdasarkan telaah dokumen, observasi dan wawancara mendalam tentang :

1. Petunjuk teknis

Analisis triangulasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan promkes di puskesmas bahwa belum ada (merupakan pelayanan dasar puskesmas). Pernyataan ini benar, dibuktikan : tidak ditemukan aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan posyandu. Namun Petugas promkes di Puskesmas Nanggalo sudah melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, tetapi dalam pelaksanaannya

sangat sulit melobi para pemangku kebijakan tersebut dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan posyandu. Kurangnya peran pengambil kebijakan tersebut dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan posyandu sehingga mempengaruhi kinerja pelaksana posyandu seperti kader. Peran kader masih kurang dalam menggerakkan ibu balita ke posyandu. Tidak adanya motivasi yang diberikan kepada kader dalam meningkatkan kinerjanya sehingga kader yang merupakan ujung tombak suksesnya penyelenggaraan posyandu tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian kader masih ada yang tidak tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya. Kader bekerja secara sukarela, ini membuat mereka bekerja kurang maksimal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis triangulasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana promkes di Puskesmas Nanggalo bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan promkes hanya 1 orang sebagai koordinator program promkes. Seharusnya minimal ada 2 orang tenaga promkes di puskesmas dan koordinator program hanya mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan.

3. Dana

Pendanaan promkes di Puskesmas Nanggalo berasal dari dana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

4. Metode

Metode advokasi yang dilakukan oleh pemegang program promkes Puskesmas Nanggalo yaitu dengan melakukan pendekatan (lobi) kepada pihak-pihak pemangku kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo seperti Pimpinan Puskesmas Nanggalo, Camat Nanggalo, Lurah Surau Gadang untuk mendukung, dan menggerakkan posyandu.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo tentang pelaksanaan advokasi oleh petugas promkes kepada pemangku kebijakan terhadap kunjungan ibu balita ke posyandu, bahwa :

A. MASUKAN (*INPUT*)

1. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis di Puskesmas Nanggalo belum ada dan tidak ada dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) pelaksanaan penyelenggaraan posyandu sehingga siapa-siapa yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan posyandu di Puskesmas Nanggalo, pemegang program promkes telah melakukan upaya advokasi seperti melobi / melakukan pendekatan kepada Pimpinan Puskesmas, Lurah dan Camat untuk mengudung setiap kegiatan yang diadakan di posyandu, serta mengupayakan setiap pemangku kebijakan tersebut mengeluarkan aturan dan kebijakan untuk kesuksesan kegiatan penyelenggaraan posyandu.

Dalam pelaksanaan posyandu, petugas promkes langsung memberikan pelayanan kesehatan seperti melakukan penimbangan, pencatatan (pemantauan kesehatan ibu dan tumbuh kembang balita) imunisasi, pemberian vitamin A dan penyuluhan kesehatan serta pemberitahuan jadwal posyandu bersama kader.

Padahal jika dikaji promkes erat kaitannya dengan upaya advokasi yang dilakukan pemegang program promkes dalam rangka menghimpun dukungan dari pimpinan dan para pengambil kebijakan untuk mengeluarkan aturan, reward dan sanksi penyelenggaraan kegiatan posyandu.

Petugas promosi kesehatan Puskesmas Nanggalo aktif melakukan pendekatan kepada Pimpinan Puskesmas, melobi Lurah dan Camat untuk mendukung kegiatan posyandu dan mengeluarkan kebijakan melalui petunjuk teknis pelaksanaan, pemberian penghargaan dan

sangsi dalam rangka kemajuan posyandu. Selain berkoordinasi dengan Pimpinan puskesmas, petugas promkes juga sudah melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi ibu balita memanfaatkan pelayanan posyandu.

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2007), salah satu faktor penguat (*reinforcing*) yang mempunyai peranan penting untuk merubah perilaku yaitu adanya aturan yang jelas dan mengikat pelaksanaannya (dituangkan dalam bentuk SK)

Menurut Penelitian Sucipto (2009) bahwa adanya kebijakan promkes dapat berperan dalam praktik peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Peran promkes yang dijalankan ada pada seluruh sektor misalnya : lurah, toma, kader dan petugas puskesmas.

Oleh karena itu berdasarkan analisis peneliti perlu adanya petunjuk teknis yang menjelaskan peran dan fungsi tenaga pelaksana promkes yang dituangkan pada Surat Keputusan (SK) tentang tugas dan tanggung jawabnya memotivasi ibu balita ke posyandu. Karena pada dasarnya setiap aturan / petunjuk teknis yang dituangkan pada SK akan memicu semangat dan mengikat SDM yang terlibat untuk menggerakkan posyandu. Misalnya aturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan promkes terkait proses advokasi yang dilakukan oleh pemegang program promkes kepada Camat, Lurah, dan pimpinan puskesmas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian diketahui bahwa SDM yang terlibat adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan puskesmas seharusnya hanya mengkoordinir kegiatan promkes dan berjumlah minimal 2 orang sebagai penanggung jawab kegiatan. Petugas promkes langsung dalam memotivasi ibu balita ke posyandu dan melakukan penyuluhan pada hari posyandu.

Hasil penelitian Sucipto (2009) menyatakan bahwa tenaga yang membantu dalam promkes untuk meningkatkan kunjungan ibu balita ke posyandu merupakan hal yang dibutuhkan. Namun kenyataannya pandangan masyarakat menyatakan posyandu hanya milik puskesmas. Padahal posyandu merupakan unit pelayanan terdepan yang berada pada tingkat kelurahan/desa dan yang bertanggung jawab adalah lurah, toma, dan tim penggerak PKK.

Peran petugas kesehatan sebagai pelaksana program harus diikuti oleh peran dan tanggung jawab dari tokoh masyarakat untuk menggerakkan ibu balita guna memantau tumbuh kembang balitanya ke posyandu.

3. Dana

Hasil penelitian diketahui bahwa pendanaan dalam pelaksanaan promkes untuk peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu berasal dari dana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang digunakan untuk honor kader dan penggantian transport kader, namun jumlahnya tidak mencukupi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2009) yang menyatakan bahwa adanya dana dalam promkes dapat berperan dalam peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Peran promkes yang dijalankan ada pada seluruh sektor yang terlibat dalam pelayanan posyandu yaitu petugas puskesmas, toma dan kader posyandu harus didukung oleh pendanaan sehingga petugas memiliki motivasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2007), salah satu faktor pemungkin (*enabling*) yang mempunyai peranan penting untuk merubah perilaku yaitu tersedianya biaya. Biaya atau dana ini adalah salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam merubah perilaku seseorang. Dalam hal ini, tersedianya dana kegiatan posyandu terutama untuk honor dan transportasi kader akan memotivasi kader lebih aktif lagi bekerja menggerakkan ibu balita ke posyandu.

Partisipasi masyarakat menimbulkan masalah tersendiri bagi posyandu, dikarenakan pengunjung posyandu amat kurang, penyebabnya ialah promosi, dan regenerasi posyandu yang kurang baik, serta ketersediaan dana yang kurang.

Oleh karena itu untuk menjalankan kegiatan posyandu, seharusnya tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah tapi juga peran serta dari masyarakat dengan mengadakan iuran wajib maupun arisan rutin masyarakat yang kemudian dana yang terkumpul dapat

dimanfaatkan untuk honor kader sehingga dapat memotivasi kader dalam memotivasi ibu balita ke posyandu. Ketersediaan dana untuk PMT, pelatihan kader, pelatihan dan pemberian keterampilan kepada toma tentang posyandu juga akan mensukseskan program posyandu terutama dalam menggerakkan ibu balita ke posyandu.

4. Metode

Metode promkes yang dilakukan yaitu memberikan penyegaran kader dan penyediaan PMT. Wawancara ini didukung hasil pengamatan peneliti bahwa tidak ada PMT, peran Toma, tim penggerak PKK kurang. Kader tidak melakukan pemantauan tumbuh kembang balita ke rumah-rumah ibu balita yang tidak berkunjung ke posyandu serta keterampilan & keahlian petugas promkes dalam melobi pemangku kebijakan perlu ditingkatkan dalam menggerakkan posyandu.

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2003), salah satu faktor pemungkin (*enabling*) yang mempunyai peranan penting untuk merubah perilaku yaitu keahlian petugas. Keahlian petugas adalah salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam merubah perilaku ibu balita untuk membawa balitanya ke posyandu. Dalam hal ini, dengan adanya pemberian pelatihan kepada petugas promkes tentang keterampilan dalam *lobiing* dan kader sebagai ujung tombak penyelenggaraan posyandu perlu dilatih.

Metode yang kreatif dengan diikuti oleh peraturan yang baik, seharusnya menjadi dasar bahwa pentingnya aturan yang mengatur mengenai terlaksananya promkes dalam peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Tetapi pada kenyataannya aturan dan prosedur tetap tidak ada untuk dijadikan pedoman dalam mengontrol kegiatan promkes yang dilakukan karena sifatnya yang tidak mengikat secara kuat.

Aturan penyelenggaraan promkes yang lengkap dalam peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dikeluarkan kebijakan terkait tentang pengembangan kegiatan posyandu ini oleh para pemangku kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. Selain itu, petugas dan kader menyesuaikan tempat posyandu yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan waktu yang kondusif bagi masyarakat. Peran sosialisasi dan perencanaan yang strategis ini bisa memberikan informasi untuk setiap petugas dan instansi terkait sehingga dapat membuat perencanaan kedepannya untuk diajukan guna memperbaiki pelayanan kesehatan di posyandu dan meningkatkan kunjungan ibu balita ke posyandu.

5. Sarana

Hasil penelitian diketahui bahwa prasarana (masih adanya posyandu yang belum memiliki bangunan sendiri), dan sarana posyandu masih banyak yang tidak memadai seperti timbangan banyak yang tidak layak pakai karena sudah lama dan tidak dikalibrasi sehingga pengukurannya tidak valid. Pemanfaatan media informasi seperti papan informasi, brosur, leaflet tentang pentingnya posyandu belum ada sehingga ibu balita tidak tertarik datang ke posyandu.

Puskesmas Nanggalo, belum memiliki bangunan sendiri sehingga perlu adanya swadaya masyarakat untuk menyediakan bangunan posyandu dan secara bersama menciptakan lingkungan posyandu yang nyaman. Selain dari unsur bangunan, sarana timbangan juga perlu diperhatikan apabila banyak timbangan yang tidak layak pakai karena sudah lama dan tidak dikalibrasi sehingga pengukurannya tidak valid dapat menyebabkan penurunan minat dan kepercayaan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kunjungan ke posyandu.

Fasilitas kesehatan merupakan sarana penting dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan dan penyuluhan terhadap masyarakat. Fasilitas atau sarana kesehatan yang harus tersedia demi kenyamanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, fasilitas penunjang untuk pelayanan yang diberikan dapat berupa fasilitas gedung pelayanan yang memadai dan dapat menimbulkan daya tarik, serta informasi kesehatan yang didapat baik cetak dan elektronik (Notoatmodjo, 2010).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2009) yang menyatakan bahwa adanya sarana yang mendukung dalam promkes dapat berperan dalam

peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Sarana dan prasarana yang ada dapat menarik minat ibu balita untuk datang ke posyandu dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di posyandu.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kunjungan ibu balita ke posyandu dalam melakukan penimbangan untuk bayi dan balita perlu juga adanya pemanfaatan media informasi seperti papan informasi, poster, brosur, leaflet dalam memberitahukan jadwal posyandu sehingga ibu balita tertarik datang ke posyandu dan memanfaatkan pelayanan yang ada di posyandu

B. PROSES (PROCESS)

Komponen proses yang dibahas dalam penelitian ini meliputi proses promosi kesehatan terkait proses advokasi :

Advokasi

Petugas pemegang program promosi kesehatan melakukan advokasi (pendekatan dan lobi) kepada Pimpinan Puskesmas Nanggalo, Camat Nanggalo dan Lurah Surau Gadang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen ditemukan bahwa hanya Pimpinan Puskesmas Nanggalo yang mendukung pelaksanaan posyandu ini, sedangkan Camat dan Lurah kurang mendukung dalam mendorong dan mengembangkan posyandu. Petugas promkes berupaya selalu melobi dan meyakinkan pihak-pihak tersebut bahwa posyandu adalah milik masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Jadi penanggungjawab penyelenggaraan posyandu adalah pimpinan bersama-sama dengan masyarakat tersebut. Oleh karena itu sangat penting sekali para pimpinan untuk mendukung berjalannya dan suksesnya kegiatan posyandu. Untuk itu petugas promkes membekali para pimpinan tersebut yaitu dengan memberikan buku pedoman (penatalaksanaan kegiatan posyandu). Sehingga melalui pendekatan yang dilakukan petugas promkes tadi, diharapkan para pimpinan tersebut dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aturan serta memberikan penghargaan dan sanksi kepada ibu-ibu balita yang memanfaatkan pelayanan posyandu dan yang tidak memanfaatkan pelayanan posyandu. Agar dapat meningkatkan tingkat kunjungan ibu balita ke posyandu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo bahwa pada pelaksanaan posyandu di rumah kader, bahwa perangkat Lurah tidak mengetahui hari pelaksanaan posyandu. Toma, Tim Penggerak PKK, dan kader kurang memotivasi ibu mendapatkan fasilitas pelayanan di posyandu. Tidak ada Pemberian Makanan Tambahan berupa kacang padi, telur rebus, dll) kepada ibu balita. Sehingga kurang menarik minat ibu balita berkunjung dan memanfaatkan pelayanan posyandu.

Sumber dana posyandu adalah dari swadaya masyarakat setempat, dikumpulkan dan dikelola oleh kader. Oleh karena itu diharapkan pimpinan terkait dapat membantu dana penyelenggaraan posyandu ini dan membuat aturan dalam menghimpun dana swadaya masyarakat ini. Seperti sistem arisan, donatur warga, dll). Karena dengan adanya PMT tersebut, menjadi penarik bagi ibu dan balita untuk berkunjung dan mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas promosi kesehatan dan kader bahwa kader secara sukarela aktif bekerja tanpa mengharapkan imbalan, karena tidak ada pemberian honor yang jelas setiap bulan kepada kader.

Dalam proses advokasi ini, petugas promkes Puskesmas Nanggalo melakukan upaya kepada para pimpinan untuk mengeluarkan kebijakan terkait kesejahteraan kader. Karena kader selama ini bekerja secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi ditemukan bahwa kader kurang yang aktif bekerja. Insentif kader tidak dibayarkan sesuai dengan aturan, sehingga membuat kader malas bekerja.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sucipto (2009) yang menyatakan bahwa dengan adanya dukungan pimpinan dalam promosi kesehatan dapat berperan dalam praktik

peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu. Adanya poses advokasi yang terbentuk dapat mendorong para pengambil keputusan untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan memanfaatkan pelayanan posyandu terutama melakukan penimbangan untuk balita agar dapat memantau tumbuh kembangnya.

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2007), salah satu faktor pemungkin (*enabling*) yang mempunyai peranan penting untuk merubah perilaku yaitu tersedianya keterampilan petugas. keterampilan petugas adalah salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam merubah perilaku seseorang. Dalam hal ini, keterampilan petugas kesehatan dalam berkomunikasi dan meyakinkan pihak-pihak pimpinan untuk mendukung suksesnya kegiatan posyandu perlu ditingkatkan.

Dengan kegiatan dimana petugas kesehatan dapat mencari dukungan sosial bersama pimpinan melalui pepsodent dan lifebouy dalam menghimpun donatur untuk posyandu serta melakukan kerjasama yang baik. Contohnya mengundang pihak Lifebouy dan pepsodent tersebut untuk mendemonstrasikan kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabu dengan air yang mengair (CTPS) dan Personal Hygiene tentang mencegah gigi berlobang dengan menggosok gigi minimal dua kali sehari.

C. KELUARAN (*OUTPUT*)

Hasil penelitian diketahui bahwa output promosi kesehatan terkait kegiatan advokasi dalam peningkatan kunjungan ibu balita di Puskesmas Nanggalo masih rendah. Upaya dalam mengadvokasi para pimpinan ini dilakukan oleh petugas promkes.

Faktanya masih terdapat posyandu dengan tingkat kunjungan ibu balita yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan diantaranya rendahnya dukungan para pemangku kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan posyandu. Fasilitas posyandu yang tidak memadai (bangunan dan media edukasi di posyandu), kader kurang aktif bekerja karena sukarela, peran Toma dan Tim PKK urang.

Untuk meningkatkan kunjungan ibu balita perlu dilakukan beberapa inisiatif diantaranya puskesmas harus memiliki kohort balita sendiri untuk memantau balita yang sudah mendapatkan pelayanan di posyandu, selain daripada itu daya tarik posyandu berupa fisik bangunan yang memadai dan dilengkapi fasilitas juga menjadi hal yang penting dalam peningkatan partisipasi ibu balita, swadaya masyarakat dalam hal mendukung kegiatan posyandu juga perlu dilakukan dengan membentuk arisan warga demi membantu pelaksanaan kegiatan posyandu contohnya PMT.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan promkes dalam peningkatan kunjungan ibu balita ke posyandu di Puskesmas Nanggalo kurang baik, disebabkan karena kurangnya dukungan para pimpinan di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dalam mengeluarkan kebijakan, aturan mendukung suksesnya kegiatan posyandu. Diharapkan Petugas promkes bersama pimpinan menghimpun sumber dana kegiatan posyandu melalui kerjasama dengan stake holder terkait seperti pepsodent dan lifebouy dalam menghimpun donatur untuk posyandu serta melakukan kerjasama yang baik.

Sistem pencatatan dan pelaporan dimana petugas pemegang promkes memasukkan data setiap bulannya dan melaporkan pencapaian tingkat kunjungan ibu balita ke posyandu kepada pimpinan puskesmas. Permasalahan ini dibicarakan pada lokakarya mini, dimusyawarahkan secara bersama dan diberikan pemecahannya. Untuk kader yang kurang aktif petugas promosi kesehatan melakukan kegiatan pelatihan dan penyegaran kader.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan para pimpinan dan kerjasama lintas sektor terkait untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan posyandu. Suksesnya kegiatan posyandu ini, juga sangat ditentukan dari adanya penyusunan perencanaan, proses dan monitoring / evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Selain daripada itu perlu adanya revisi target balita yang ditimbang dan disesuaikan dengan jumlah balita yang ada di wilayah kerja puskesmas melalui pendataan kembali jumlah balita.

Dalam menunjang pelaksanaan promkes perlu meningkatkan frekuensi penyuluhan yang dilakukan oleh petugas bersama kader untuk memberikan informasi mengenai pentingnya membawa balita ke posyandu guna memantau tumbuh kembang balita. Selain daripada itu dengan adanya kader sebagai petugas yang berada pada jejaring terdekat di masyarakat perlu diperhatikan insentif dan penghargaan yang diberikan sehingga dapat memotivasi kader dalam bertugas serta dapat memotivasi ibu balita ke posyandu.

SIMPULAN

Hasil penelitian Pelaksanaan Promosi Kesehatan tentang advokasi dengan Kunjungan Ibu Balita ke Posyandu diketahui Di Puskesmas Nanggalo didapatkan belum ada petunjuk teknis tentang bagaimana promosi kesehatan yang dilakukan terkait proses advokasi, sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Petugas pemegang program promosi kesehatan sebagai pelaksana posyandu dan koordinator kegiatan posyandu. Sudah dilakukan kerjasama lintas sektor dan program. Hanya saja lintas sektor yang terlibat kurang berpartisipasi menggerakkan posyandu. Kader kurang aktif bekerja, karena selama ini kader berkerja secara sukarela. Prasarana (tempat posyandu menumpang di rumah warga atau mesjid) dan sarana (timbangan belum dikalibrasi serta poster, leaflet, PMT) tidak ada di Puskesmas Nanggalo .

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Edisi ke tiga. Bina Pura Aksara. Jakarta.
- Dinkes Prov Sumbar. 2016. *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang*. Dinas Kesehatan Provinsi.
- _____. 2014. *Kebijakan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini di Bidang Kesehatan*. Model Integrasi Posyandu, PAUD, BKB di Padang.
- Depkes RI. 2006. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2006. *Panduan Integrasi Promosi Kesehatan*. Pusat Promkes Depkes RI. Jakarta.
- _____. 2008. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2008. *Modul Kesehatan Bagi Tenaga Promosi Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta.
- _____. 2011. *Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025*. Jakarta.
- Dinkes Kota Padang. 2016. *Laporan Tahunan Promosi Kesehatan Tahun 2013*. Dinas Kesehatan Kota Padang.
2010. (Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat.
- Kemenkes RI. 2010. *Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta.
- _____. 2011. *Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan, Pantuan Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta.
- _____. 2015. *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2015*. Jakarta.
- _____. 2016. *Laporan Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Menuju Perbaikan Gizi Perseorangan dan Masyarakat yang Bermutu Tahun 2015*. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Bina Gizi. Jakarta.
- _____. 2016. *Pedoman Pengelolaan Posyandu*. Jakarta.
- Laporan Tahunan Program Promosi Kesehatan Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. Tahun 2016
- _____. 2016. *Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang*.
- Laporan Tahunan Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. Tahun 2016
- _____. *Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang*. Tahun 2016.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2003. *Kesehatan Masyarakat (Ilmu dan Seni)*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

- 2010. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pratiwi, N.L. *Penilaian Peran Serta Masyarakat dalam Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi*. Puslitbang Sistem Kebijakan Kesehatan. (Vol. 23, No. 2, Hal. 89-95, Juni 2007). Surabaya, Jawa Timur.